

**Pengumuman LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan
telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	I Nyoman Radiarta	Kepala BPPSDM KP	Telah melaporkan LHKPN, namun status menunggu verifikasi KPK (tersedia LHKPN 2024)
2.	Lilly Aprilya Pregiwati	Sekretaris BPPSDM	Telah melaporkan LHKPN, namun status menunggu verifikasi KPK (tersedia LHKPN 2024)
3.	Joni Haryadi	Kepala Pusat Pelatihan KP	Telah melaporkan LHKPN, namun status menunggu verifikasi KPK (tersedia LHKPN 2024)
4.	A. Rita Tisiana Dwi K	Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi KP	LHKPN telah verifikasi KPK
5.	Yayan Hikmayani	Kepala Pusat Penyuluhan KP	LHKPN telah verifikasi KPK
6.	Alan Frendy Koropitan	Kepala Pusat Pendidikan KP	LHKPN telah verifikasi KPK

Bukti Pelaporan


Transparansi itu Mudah!

[BERANDA](#) |
 [PANDUAN](#) |
 [FAQ](#)



PENIE I
 BADAN
 KEMEN
 LOGO

e-REGISTRATION <

e-REPORTING ▾

Report Pelaporan Unit Kerja

Report Penyampaian Unit Kerja

Lampiran Kekurangan Unit Kerja

Daftar Kekurangan Wajib Laporan

Monitoring Individu

Monitoring Instansi

Monitoring KepatuhanUK_UK |
 Tabel Monitoring KepatuhanU...



Report Pelaporan Penyelenggara Negara

Penarikkan Data per Tanggal : 23/06/2026 02:20:32

Nama

Halaman

Jumlah Baris

No	NIP/NRP	nama	provinsi	Nama Instansi	Jabatan - UK - SUK	jabatan	bidang	Status Pelaporan
1	1972040219..	I Nyoman Radiarta	--	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERI..	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTIF	Sudah Lapo...

Pengumuman belum tersedia



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

[elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ](#)

☆
📄
Paused



eLHKPN
Transparan itu Mudah!

[Login](#)

Tentang e-lhkpn

Panduan Aplikasi

Unduh

e-Announcement

Dashboard

Kontak Kami

FAQ

Caril :

Tahun Laporan :

Lembaga :

*Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. KPK tidak bertanggung jawab atas Informasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersumber dari situs dan/atau media lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara pengumuman yang tercantum dalam situs e-Aunouncement dengan informasi yang berasal dari situs dan/atau media lainnya, maka informasi yang dianggap valid adalah informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement ini.

Situs ini menampilkan **Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara** atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan **Aplikasi e-LHKPN** (dimulai dari LHKPN Tahun 2017 dan seterusnya) dan menggunakan **Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B**.

Situs ini hanya menampilkan Perbandingan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2018 dan seterusnya).

No.	Nama	Lembaga	Unit Kerja	Jabatan	Tanggal Laporan	Jenis Laporan	Total Harta Kekayaan	Aksi
Belum ada data								



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I Nyoman Radiarta
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 454066

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	979.800.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/105 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 979.800.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	269.000.000
1. MOBIL, MAZDA MAZDA3 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
2. MOBIL, KIA KIA SPORTAGE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.780.937.549
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.045.637.549
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.045.637.549

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Sekretaris BPPSDM

Bukti Pelaporan

elhkpn
Transparansi Itu Mudah!

BERANDA PANDUAN FAQ

e-REGISTRATION

e-REPORTING

Report Pelaporan Unit Kerja

Report Penyampaian Unit Kerja

Lampiran Kekurangan Unit Kerja

Daftar Kekurangan Wajib Laporan

Monitoring Individu

Monitoring Instansi

Monitoring KepatuhanUK_UK | Tabel Monitoring KepatuhanU...

Report Pelaporan Penyelenggara Negara

Pencarian Data per Tanggal : 23-06-2016 02:20:32

Nama

Halaman

Jumlah Baris

III

1

10

No	NIP/NPK	Nama	Provinsi	Nama Instansi	Jabatan - UK - SUK	Jabatan	bidang	Status Pelaporan
1	1968040719...RR	LILLY APRILYA PREGIOWATI	...	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA PUSAT - BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERI...	KEPALA PUSAT	EKSEKUTIF	Sudah Laporan

Pengumuman belum tersedia

elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ

☆ ⬇ ⏸ ⋮

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

elhkpn
Transparansi Itu Mudah!

Login

Tentang e-lhkpn Panduan Aplikasi Unduh e-Announcement Dashboard Kontak Kami FAQ

Caril : Lilly Aprilya Pregiowati

Tahun Laporan : 2025

Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DA...

Q

Clear

*Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. KPK tidak bertanggung jawab atas Informasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersumber dari situs dan/atau media lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara pengumuman yang tercantum dalam situs e-Announcement dengan informasi yang berasal dari situs dan/atau media lainnya, maka informasi yang dianggap valid adalah informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement ini.

Situs ini menampilkan **Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara** atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan **Aplikasi e-LHKPN** (dimulai dari LHKPN Tahun 2017 dan seterusnya) dan menggunakan **Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B**.

Situs ini hanya menampilkan Perbandingan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2018 dan seterusnya).

No.	Nama	Lembaga	Unit Kerja	Jabatan	Tanggal Laporan	Jenis Laporan	Total Harta Kekayaan	Aksi
Belum ada data								

⬆



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILLY APRILYA PREGIWATI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 209222

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.178.960.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 1.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 291 m2/250 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
9. Tanah Seluas 503 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 154.960.000



10. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 144.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 767.067.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 616.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 151.067.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 43.295.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 259.163.585**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 6.248.485.585**

III. HUTANG **Rp. 573.469.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 5.675.016.585**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Kepala Pusat Pelatihan KP
Bukti Pelaporan

elhkpn

Transparan itu Mudah!

BERANDA

PANDUAN

FAQ

Profil

PENIE LEKASA

BADAN PENYUJU

KEMENTERIAN

LOGOUT

e-REGISTRATION

e-REPORTING

Report Pelaporan Unit Kerja

Report Penyampaian Unit Kerja

Lampiran Kekurangan Unit Kerja

Daftar Kekurangan Wajib Laporan

Monitoring Individu

Monitoring Instansi

Monitoring KepatuhanUK_UK

Tabel Monitoring KepatuhanUK_UK

Report Pelaporan Penyelenggara Negara

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pencarian Data per Tanggal : 23-06-2026 02:20:32

Nama

joni har

Halaman

1

Jumlah Baris

10

No	NIP/KEP	Nama	Previdi	Nama Instansi	Jabatan - UK - SUK	Jabatan	Isi	Status Pelaporan
1	1973060320...	DR JONI HARYADI MSC	--	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN + BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERI...	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	EKSEKUTIF	Sudah Laporan

Pengumuman belum tersedia

elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ

☆

Paused

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

elhkpn

Transparan itu Mudah!

Login

Tentang e-lhkpn

Panduan Aplikasi

Unduh

e-Announcement

Dashboard

Kontak Kami

FAQ

Carli :

Joni haryadi

Tahun Laporan :

2025

Lembaga :

KEMENTERIAN KELAUTAN DA...

Q

Clear

*Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. KPK tidak bertanggung jawab atas informasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersumber dari situs dan/atau media lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara pengumuman yang tercantum dalam situs e-Announcement dengan informasi yang berasal dari situs dan/atau media lainnya, maka informasi yang dianggap valid adalah informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement ini.

Situs ini menampilkan **Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara** atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan **Aplikasi e-LHKPN** (dimulai dari LHKPN Tahun 2017 dan seterusnya) dan menggunakan **Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B**.

Situs ini hanya menampilkan Perbandingan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2018 dan seterusnya).

No.	Nama	Lembaga	Unit Kerja	Jabatan	Tanggal Laporan	Jenis Laporan	Total Harta Kekayaan	Aksi
Belum ada data								



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONI HARYADI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 510902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.075.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 353 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000

1. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIK Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 136.111.433

F. HARTA LAINNYA Rp. 145.000.000

Sub Total Rp. 1.364.361.433

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.364.361.433

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA :
KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. RITA TISIANA DWI K.
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 907877

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	123.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	99.550.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	782.167.093
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.004.717.093

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.004.717.093

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAYAN HIKMAYANI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 732748

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/218 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI , Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 594 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/326 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 181 m2/181 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/134 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/193 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 7.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 X1H02N35M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 468.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 66.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.291.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.291.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. ALAN FRENDY KOROPITAN, SPI, M.SI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 1001138

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.493.035.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 2.354.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.138.935.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ C180 W204 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 253.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 377.923.942

F. HARTA LAINNYA Rp. 61.041.819

Sub Total Rp. 4.415.600.761

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.415.600.761

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.